

INFORMATION POVERTY: KEMISKINAN INFORMASI DAN PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM PENGENTASANNYA

Himayah

Kepala UPT Pusat Perpustakaan UIN Alauddin
Kampus 2 UIN Alauddin Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata, Gowa
e-mail : mayaperpus@gmail.com

Abstract

Information and communication technology (ICT) plays an important role in classifying the world in information rich and information poor. Poverty is not only limited information by "people who mastered the technology" and "people who do not master the technology". More complex phenomenon, including language and cultural diversity issues, level of education and the ability to access information and take advantage of that information. There are several factors that cause information poverty. Among others are access to information, socio-economic factors and the factor of information infrastructure and information context of each individual. To overcome the problem, the solutions are the presence of information equality, and information literacy skills. Information literacy is a set of skills to know when an information is needed, and where the information located, evaluation and the use of the information effectively. Good library can play its role in information equality and sharing, by providing various forms of means of information and all of them can be freely and widely used by those who need it.

Kata kunci : Kemiskinan Informasi, Literasi Informasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

A. Pendahuluan

Saat ini merupakan era di mana batas-batas wilayah dan negara menjadi kurang relevan, terutama dalam hal pertukaran informasi. Sejak internet diperkenalkan dalam dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) setelah telegram, telepon, radio, televisi, dan komputer, maka banyak informasi menjadi lebih mudah diakses. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di semua tempat dan pada semua orang, karena adanya kesenjangan yang disebabkan berbagai macam hal.

Hal itu menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, yaitu kemiskinan informasi, yang jika tidak diantisipasi akan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi, kebudayaan, dan sosial politik, terutama di negara-negara dunia ketiga. Konsep kemiskinan informasi ini sudah mulai dikenal pada tahun 1950an, dan sebenarnya sudah disadari jauh sebelumnya. Akan tetapi, sebuah dimensi baru ditambahkan pada pengertian kemiskinan informasi seiring dengan bergesernya era informasi. Pergeseran ini, diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT). Lievrouw dan Farb (2003 : h. 499-538) mengemukakan bahwa perdebatan tentang kemiskinan informasi tertutupi selama dekade terakhir oleh perkembangan kebutuhan TIK. Teknologi ini berkembang sangat pesat dan mengakibatkan tumbuhnya industri ilmu pengetahuan di negara maju. Hal ini semakin melebarkan jurang pemisah antara negara kaya dan miskin, mengakibatkan terciptanya istilah negara kaya informasi dan negara miskin informasi.

Kemiskinan informasi bukan hanya sebuah keadaan politik, budaya atau sosio ekonomi saja. Kita hidup di masyarakat informasi global yang terus berkembang di mana kita lebih tergantung pada penciptaan, akses, berbagi dan pemanfaatan informasi lebih dari pada sebelumnya. Hal ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran atas kebebasan, hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak untuk mendapatkan informasi dan pemerataan informasi.

Perpustakaan sejak dahulu kala menjadi tempat pencarian berbagai jenis informasi, terutama dalam bentuk tercetak. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam banyak hal mempengaruhi perpustakaan, baik itu jenis koleksinya, penanganannya, cara penelusuran informasinya, serta layanan perpustakaan sendiri. Hal ini perlu diantisipasi oleh pustakawan yang bekerja di perpustakaan itu sendiri, terutama perpustakaan lembaga pendidikan.

B. Permasalahan

Walaupun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peranan penting dalam memilah-milah dunia ini menjadi kaya informasi dan miskin informasi, kemiskinan informasi tidak hanya dibatasi oleh “orang yang menguasai teknologi” dan “orang yang tidak menguasai teknologi”. Fenomenanya lebih kompleks, termasuk masalah keragaman bahasa dan budaya, tingkat pendidikan dan kemampuan untuk mengakses informasi dan mengambil manfaat dari informasi tersebut. Lebih lanjut, jurang pemisah antara si kaya informasi dan si miskin informasi bukan hanya dipisahkan oleh lingkungan dan negara. Juga antara individu-individu yang mungkin berada pada budaya yang sama dan tempat yang sama.

Melihat bahwa pada kenyataannya kemiskinan informasi mempengaruhi kehidupan banyak orang setiap harinya, maka seharusnya masalah ini menjadi tanggungjawab sosial. Hal ini sangat penting bahwa kelanjutan pembentukan masyarakat informasi harus diatur dengan prinsip-prinsip universal yang berdasarkan atas keadilan sosial. Karena itu dipandang perlu untuk mengenali akar permasalahan kemiskinan informasi secara lebih mendalam, dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Perpustakaan sebagai sumber informasi seringkali belum melaksanakan fungsinya sebagai pusat pencarian informasi yang tepat sasaran. Seringkali para pencari informasi di perpustakaan tidak berhasil menemukan informasi yang mereka cari di perpustakaan. Sering pula tidak tersedia sarana dan layanan yang membantu penelusuran informasi yang efektif.

C. Kemiskinan Informasi

Konsep kemiskinan informasi relatif baru, dan dapat dibedakan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konektivitas informasi, pendekatan konten informasi, dan pendekatan aspek manusia, yang penekanannya adalah pada aspek pengetahuan manusia (Britz : 2004, h. 192) . Pendekatan-pendekatan tersebut dijabarkan di bawah ini.

1. Pendekatan Konektivitas Informasi

Pendekatan ini berfokus pada terbatasnya akses pada teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa ada hubungan sebab-akibat antara keadaan materi seseorang dan kemampuan akses informasi melalui TIK. Misalnya, pada umumnya informasi yang paling penting, seperti informasi yang berkaitan dengan ekonomi (seperti keadaan terkini bursa saham untuk keperluan investasi perseorangan) tersedia dalam bentuk elektronik (misalnya internet). Hal ini

mengakibatkan orang-orang yang kemampuan finansialnya terbatas atau pendidikannya rendah tidak akan dapat memanfaatkan teknologi ini. Orang-orang seperti ini berada di luar wilayah ekonomi dunia berbasis elektronik. Hal ini dipertegas oleh laporan Administrative Committee on Coordination (1997, h. 24), suatu badan pemerintah di Amerika Serikat di bidang koordinasi administrasi berpendapat bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan informasi di negara sedang berkembang adalah kurangnya akses kepada TIK.

2. Pendekatan Konten Informasi

Menurut pendekatan ini, tidak tersedianya informasi yang berkualitas dan kurangnya akses yang dibutuhkan merupakan penyebab awal kemiskinan informasi. Menurut Burgelman dkk (pada Britz: 2004, h. 192.) mengatakan bahwa perbedaan antara masyarakat kaya dan miskin informasi lebih dari sekedar masalah digitalisasi informasi, tapi juga keterjangkauan, ketersediaan dan kesesuaian informasi itu sendiri. Pendekatan ini juga berdasarkan atas asumsi bahwa orang miskin tidak mempunyai modal kebendaan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas (misalnya mereka hanya bisa membaca koran lama/bekas, karena tidak bisa berlangganan. Akibatnya informasi yang mereka terima selalu ketinggalan).

3. Pendekatan Aspek Manusia

Pendekatan aspek manusia dalam hal kemiskinan informasi tidak berdasarkan perumpamaan kaya miskin, tetapi berdasarkan pandangan hermenetika informasi. Informasi dipandang sebagai konstruksi sosial yang membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Karena itu akses informasi bukanlah merupakan satu-satunya aspek. Manusia harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi yang berguna. Kemampuan ini ditentukan oleh tingkat pendidikan, pengalaman dan faktor kontekstual lainnya. UNESCO (1998, h. 31) cenderung untuk menggunakan istilah 'masyarakat pengetahuan (knowledge societies)' daripada 'masyarakat informasi (information societies)', yang lebih menekankan pentingnya pendidikan di era informasi ini.

Nath (<http://www.cddc.vt.edu/knownet/articles/heralding.htm>, 2003) mengaitkan kemiskinan informasi dengan buta informasi (*illiteracy*) atau tidak memiliki kemampuan literasi informasi. Menurutnya, masyarakat di negara sedang berkembang tidak mampu untuk 'mengenali pengetahuan yang mereka miliki, memahami nilainya dan menggunakan kekuatan pengetahuan untuk mengembangkan diri'.

Singkat kata, karakteristik kemiskinan informasi merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks dan berkaitan dengan masalah geografis, baik skala internasional (negara-negara miskin informasi, misalnya negara-negara dunia ketiga) dan skala nasional dan regional (komunitas miskin informasi di wilayah tertentu).

Karena itu kemiskinan informasi dapat didefinisikan sebagai: suatu situasi dimana individu dan masyarakat, dengan konteks tertentu, tidak mempunyai keahlian, kemampuan dan materi untuk mendapatkan akses informasi yang efisien, dan ketidakmampuan untuk menginterpretasikan dan menerapkannya dengan tepat. Karakterisasinya adalah kurangnya informasi yang penting dan buruknya infrastruktur informasi yang ada.

D. Faktor Penyebab Kemiskinan Informasi

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan informasi :

1. Faktor Akses Informasi

Penyebab utamanya adalah kurang atau tidak adanya akses pada informasi yang penting, dan jika walaupun akses itu tersedia, terjadi ketidak mampuan untuk memanfaatkannya dengan tepat. Menurut data World Bank (1998, h.21.), secara khusus hal ini adalah penyebab utama kemiskinan informasi. Bukan hanya tidak adanya pengetahuan yang berkaitan dengan proses pencarian informasi, tapi juga ketidak mampuan untuk menentukan nilai produk dan layanan informasi tersebut. Diperlukan keahlian untuk menguasai teknologi yang menyediakan akses kepada informasi. Pada banyak kasus di negara berkembang pada umumnya orang mampu mengakses dan menggunakan media tradisional, seperti media cetak, tetapi tidak mempunyai keahlian untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

2. Faktor Sosial Ekonomi dan Infrastruktur Informasi

Faktor sosial ekonomi terutama muncul sebagai akibat dari globalisasi dan integrasi pada kehidupan sosial ekonomi secara global, yang disebabkan oleh kapitalisme yang mengarahkan kepada ekonomi berbasis informasi. Hal itu juga menimbulkan munculnya jaringan ekonomi dan sosial yang dengan ciri globalisasi komunikasi, pembangunan infrastruktur informasi dan globalisasi tenaga kerja, produksi dan keuangan. Distribusi produk dan layanan informasi dan perangkat keras dan lunak sebagai pendukung sektor informasi menjadi sektor andalan pada beberapa negara kaya.

Selain dampak positif di atas, globalisasi juga mengakibatkan terjadinya kemiskinan informasi. Beberapa produk dan layanan informasi yang tadinya dianggap milik semua orang menjadi dikomersialisasi dengan adanya hukum hak intelektual, sehingga informasi bisa menjadi 'mata uang'. Misalnya informasi yang berkaitan dengan bidang medis, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara dunia ketiga. Dalam hal infrastruktur informasi, tulang punggung negara-negara yang kaya informasi adalah infrastruktur informasi yang baik, yang memudahkan komunikasi informasi. Infrastruktur itu mulai dari perpustakaan, penerbit dan toko buku, distribusi media massa dan jaringan elektronik seperti internet, dan formulasi serta aplikasi kebijakan di bidang informasi.

Kebanyakan negara sedang berkembang tidak mempunyai infrastruktur informasi yang canggih seperti itu, yang mengakibatkan ketidak mampuan negara-negara tersebut untuk berpartisipasi dalam globalisasi informasi dan pertukaran pengetahuan.

3. Faktor Konteks Informasi Setiap Individu

Konteks yang dimaksud antara lain pesan dan simbol yang ditemui seseorang dalam percakapan dan interaksi melalui media. Implikasinya adalah, dua orang yang berbeda, berada dalam lingkungan yang sama, mempunyai interpretasi yang berbeda tentang sebuah informasi yang sama karena bergantung pada pengalaman dan pengetahuan (konteks informasi). Hal ini juga mengakibatkan bahwa seseorang dapat dianggap kaya informasi dan dapat menerapkan makna informasi dengan tepat. Sedangkan orang lain pada konteks atau situasi yang sama mungkin miskin informasi

karena ketidak mampuan untuk memahami makna informasi pada konteks yang sama tersebut. Misalnya, ketika dua orang mahasiswa yang mendapat tugas kuliah tentang manajemen pengetahuan, mengakses artikel yang sama di internet berjudul “ *the importance of knowledge management*”, salah satunya bisa memahami makna informasi tersebut karena mampu berbahasa Inggris dan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung di dalamnya untuk mengerjakan tugas, sedangkan yang lainnya, yang tidak mampu berbahasa Inggris, tidak memahami isi artikel tersebut dan tidak bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan tugas kuliahnya.

E. Solusi Mengatasi Kemiskinan Informasi

1. Keadilan Informasi

Seperti halnya dengan mengatasi kemiskinan materi, keadilan bisa menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan ini. Dalam hal ini keadilan berinformasi. Mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, baik itu orang yang mampu ataupun tidak. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang sama, dan pihak yang kaya informasi bersedia menyediakan akses ke sarana informasinya bagi pihak yang miskin informasi. Juga antara kedua pihak juga harus berbagi (*sharing*) informasi, karena yang kaya informasi mungkin saja juga membutuhkan informasi tertentu dari yang hanya dimiliki oleh pihak yang miskin informasi. Selain itu semua pihak mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di dunia informasi. Setiap orang di masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mengakses informasi penting yang diperlukan untuk mengembangkan diri. Selain itu perlu diciptakan kesempatan yang sama untuk menerapkan hak atas akses informasi tersebut.

Tentu saja hal tersebut banyak tergantung pada kesadaran berkeadilan informasi para pihak yang memiliki dan menguasai infrastruktur informasi yang baik. Jika mereka mau berbagi “harta informasi” itu kepada pihak lain yang membutuhkan, tentu hal tersebut akan sangat membantu pihak yang miskin informasi. Akan tetapi, sebenarnya yang diuntungkan bukan hanya para pihak yang diberikan bantuan tersebut, akan tetapi juga pihak kaya informasi. Karena belum tentu pihak kaya informasi telah memiliki semua informasi yang ada di dunia ini. Pihak miskin informasi juga mempunyai informasi-informasi tertentu yang mungkin dibutuhkan oleh pihak kaya informasi. Jadi hubungan saling berbagi informasi dan infrastrukturnya ini kemudian akan saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Literasi Informasi

Belajar merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, bukan hanya di pendidikan formal saja. Setiap orang perlu memiliki kemampuan intelektual untuk menganalisa dan berpikir kritis, dan juga mampu untuk membentuk kerangka untuk memaksimalkan proses belajarnya. Untuk dapat melakukan hal ini, diperlukan literasi informasi, atau biasa juga disebut keberaksaraan informasi. Literasi informasi adalah serangkaian keahlian untuk mengetahui kapan sebuah informasi tersebut dibutuhkan, dan mampu untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi tersebut secara efektif (Association of College and Research Libraries, pada Dorner, 2006. <http://ifl.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/4/281>).

Seseorang yang berliterasi informasi akan memahami bagaimana sebuah informasi bisa memahami bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki kinerja, kebutuhan spesifik mereka dan selanjutnya

meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Karena itu, walaupun telah tersedia segala sarana dan infrastruktur informasi yang canggih, tetapi pemakainya tidak berliterasi informasi, kemiskinan informasi mungkin masih akan terjadi karenanya.

Peran perpustakaan sebagai salah satu lembaga penyedia informasi sangat penting dalam membantu penguasaan literasi informasi. Perpustakaan harus mempunyai berbagai bentuk sarana informasi, seperti buku, materi audiovisual, komputer dan akses internet. Juga mempunyai sarana penelusuran yang baik untuk membantu pencarian informasi dengan efektif, seperti katalog, terutama katalog online yang biasa juga disebut OPAC (Online Public Acces Catalog), ataupun katalog kartu dan sarana bibliografi tercetak lainnya. Selain itu juga menyediakan layanan referensi untuk konsultasi pencarian informasi yang dilakukan oleh pustakawan yang ada di bagian ini. Pustakawan referensi harus mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang penelusuran informasi yang efektif, yaitu literasi informasi dan penguasaan teknologi informasi yang memadai. Bahkan perpustakaan harus menyelenggarakan pelatihan literasi informasi kepada pengguna perpustakaan, seperti pelatihan pendidikan pemakai, konsultasi penelusuran, pelatihan internet dan lain-lain.

Pustakawan juga perlu untuk meningkatkan kemampuannya terutama di bidang literasi informasi dan penguasaan teknologi informasi dengan mengikuti seminar/workshop literasi informasi, membuat diskusi dan pelatihan bersama dengan pustakawan lain, baik dari lembaga yang sama atau dari lembaga lain, mengadakan sharing atau temu-bicara untuk saling berbagi tentang kebutuhan, layanan dan kemajuan yang dicapai di perpustakaan masing-masing, dan memberdayakan dirinya sendiri dengan fasilitas yang tersedia baik di perpustakaan atau di organisasi induk. Selain itu, perpustakaan juga dapat berperan dengan membantu pemustaka memiliki keahlian literasi informasi, antara lain dengan menyediakan layanan referensi dan pelatihan literasi informasi.

F. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diformulasikan bahwa kemiskinan informasi adalah:

1. Berkaitan dengan tidak adanya akses kepada informasi yang relevan dan sesuai.
2. Tergantung pada ada tidaknya infrastruktur informasi yang baik.
3. Sangat berkaitan dengan tingkat keberaksaraan, atau literasi informasi.
4. Juga ditentukan oleh sikap dan pendekatan kepada informasi dan nilai yang dapat diambil darinya.
5. Merupakan fenomena global, tapi dengan berbagai konteks yang berbeda.
6. Ada kaitannya dengan kurangnya modal materi untuk mengakses informasi.
7. Bukan hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tapi juga berkaitan dengan budaya dan tingkatan sosial di masyarakat.

Jelaslah, bahwa di era informasi, yang bercirikan globalisasi dan kapitalisme dan digerakkan oleh TIK, telah menyebabkan sebuah bentuk kemiskinan model baru: kemiskinan informasi. Hal ini berakibat buruk pada hampir semua aspek kehidupan perseorangan dan masyarakat. Bukan saja berakibat pada keterasingan, tetapi juga mengakibatkan ketergantungan masyarakat dan negara-negara miskin informasi kepada negara kaya informasi untuk kebutuhan akses informasi.

Selain dari hambatan ekonomi, politik, dan pendidikan yang diakibatkan oleh kemiskinan informasi ini, juga menyebabkan dilema etis yang berkaitan dengan kesadaran moral pihak yang kaya informasi. Alasan utama terletak pada ketidakadilan sosial yang muncul. Keadilan sosial ini akan membantu mengurangi kemiskinan informasi ini.

Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang menyediakan berbagai bentuk sarana informasi, seperti buku, materi audiovisual, komputer dan akses internet, dan semuanya dapat dipergunakan secara bebas dan luas oleh siapapun yang membutuhkannya. Juga mempunyai sarana penelusuran yang baik untuk membantu pencarian informasi dengan efektif, seperti katalog online, yang memudahkan pencari informasi untuk menemukan informasi. Perpustakaan juga dapat berperan dengan membantu pemustaka memiliki keahlian literasi informasi, antara lain dengan menyediakan layanan referensi dan pelatihan literasi informasi.

Daftar Acuan

- Administrative Committee on Coordination, 1997. *Statement on Universal Access to Basic Communication and Information Services*. United Nations Publications, New York.
- Dorner, Daniel G. dan G. E. Gorman, 2006. *Information Literacy Education in Asian Developing Countries: cultural factors affecting curriculum development and programme delivery*. IFLA Journal, <http://ifl.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/4/281> (diakses tanggal 28 Oktober 2009)
- Britz, Johannes J. 2004. *To Know or not to Know: A Moral Reflection on Information Poverty*. Journal of Information Science,; 30; 192. <http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/3/192> (diakses tanggal 28 Oktober 2009)
- L.A. Lievrouw and S.E. Farb. 2003. *Information and equity*. In: B. Cronin (ed.), *Annual Review of Information Science and Technology (ARIST)*, Vol. 37. Information Today, Medford, 499–538.
- United Nations Development Programme. *Poverty Report*. United Nations Publications, New York, 1998.
- World Bank. *World Development Report*. 1998. *Knowledge for Development*. World Bank, New York.
- V. Nath, *Heralding ICT Enabled Knowledge Societies*. (Way Forward for the Developing Countries, 2001). <http://www.cddc.vt.edu/knownet/articles/heralding.htm> (21 Oktober 2009).